



Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Nonlaba (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an)

Liafatra Nurlaily¹, Ayu Nurafni Octavia², Ahmad Sahri Romadon³

¹Universitas Semarang

Jalan Arteri Soekarno Hatta Tlogosari Semarang, (024) 6702757, liafatra@usm.ac.id

²Universitas Semarang

Jalan Arteri Soekarno Hatta Tlogosari Semarang, (024) 6702757, ayunurafni@usm.ac.id

³Universitas Semarang

Jalan Arteri Soekarno Hatta Tlogosari Semarang, (024) 6702757, ahmad_sahri@usm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Mei 2024

Received in revised form 2 Juni 2024

Accepted 10 Juni 2024

Available online 1 Juli 2024

ABSTRACT

This research aims to determine the situation of financial recording and the information management system in the Raudlotul Qur'an Islamic boarding school, then produces a proposal for a financial information management system in the form of an accounting information system design by SAK ETAP and ISAK 35 which has been adapted to the conditions of the boarding school. A single case study approach was applied and carried out observations, interviews, literature studies, and documentation of the data. The research results obtained were that treasurers recorded using the single entry method, there was no clear division of duties and authority among the treasurers, financial recording and reporting were not carried out in an orderly and consistent manner. Therefore, the researcher proposes the division of duties and authority of the treasurer, a flow chart of receipts and disbursements, the evidence to be available for each transaction, proposed account and financial report formats.

Key words: accounting information system, Islamic boarding school financial reports, SAK ETAP, ISAK 35, accountability.

1. Introduction

Pondok pesantren merupakan salah satu jenis model pendidikan keagamaan yang khas yang ada di Indonesia. Adanya Kyai sebagai peran sentral di pondok pesantren menjadi pembeda dengan institusi di luar pondok pesantren. Perkembangan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan faktor eksternal lain telah memberi dampak terhadap peran dan kedudukan pondok pesantren (Bank Indonesia, 2018). Keberadaan pondok pesantren sendiri dewasa ini semakin berkembang dengan jumlahnya yang terus bertambah dan masyarakat yang mondok ataupun bersekolah di yayasan pondok pesantren juga semakin meningkat. Pada tahun 2018, jumlah pondok pesantren di Indonesia telah mencapai 28.984 dengan jumlah santri sebanyak 4.290.626 (Sjafrudin, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan pondok pesantren di Indonesia memberi dampak yang cukup besar terhadap perkembangan bangsa Indonesia melalui pemberian pendidikan yang baik bagi para penerus bangsa. Pemberian pendidikan yang baik dapat dicapai apabila pondok pesantren juga memiliki manajemen pengelolaan yang baik

pula mulai dari segi sumber daya, kegiatan operasional, administrasi, serta regulasinya (Rukanda et al., 2020).

Pesantren merupakan organisasi nirlaba yang mana pendanaan yang diterima dan dikelolanya bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta dana abadi pesantren (Mukti et al., 2020). Oleh karena itu, akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan pondok pesantren sangat ditekankan guna tercapainya pengelolaan yang bijaksana, efektif, dan efisien, serta dapat memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh pengurus pondok pesantren.

Penguatan sistem akuntabilitas pondok pesantren terus menjadi perhatian seiring dengan adanya beberapa peraturan yang berdampak pada pondok pesantren yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, PMA Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren, PMA Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly.

Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2018 telah menerbitkan buku pedoman akuntansi pesantren yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Buku panduan ini merupakan kumpulan dari dua standar, yaitu SAK ETAP dan PSAK Nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang mana pada tahun 2019, PSAK 45 telah digantikan dengan ISAK 35. Buku pedoman tersebut disusun dan dipublikasikan dengan harapan dapat memandu dan memudahkan pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan akuntabel sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan dan kemajuan pondok pesantren. Namun, untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan buku pedoman tersebut, pondok pesantren haruslah terlebih dahulu memiliki sistem pengelolaan informasi keuangan yang baik yaitu dengan memiliki sistem informasi akuntansi yang disusun sesuai dengan karakteristik pondok pesantren.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak organisasi nirlaba termasuk pondok pesantren yang belum dapat menyusun laporan keuangannya dengan baik dan sesuai standar dikarenakan tidak memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan konsisten, serta kurangnya sumber daya yang mengerti mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar. Supriyati dan Bahri (2020) menemukan bahwa 3 pesantren yang menjadi objek penelitiannya membuat laporan keuangan secara manual dan belum sesuai dengan SAK ETAP. Suharni dan Kartika Sari (2019) mengatakan bahwa pondok pesantren harus dapat mengikuti zaman dengan memiliki sistem informasi keuangan dan melakukan penerapan sistem informasi akuntansi pada pondok pesantren di kota madiun. Penelitian sejenis dilakukan oleh Sulistiani (2019) dan Sulistiani (2020) yang menemukan bahwa pondok pesantren sabilurrosyad belum memiliki sistem dan pelaporan keuangan yang sesuai standar, serta pondok pesantren hanya mampu mencatat arus kas masuk dan kas keluar.

Uraian di atas menunjukkan masih banyak organisasi nirlaba termasuk pondok pesantren yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangannya dengan sangat sederhana dan manual. Berdasarkan wawancara awal yang telah peneliti lakukan, hal ini juga dialami oleh pondok pesantren Raudlotul Qur'an di Semarang. Responden menyatakan bahwa hingga saat ini, pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan cara manual, bendahara pondok pesantren tidak mengetahui waktu dan cara pencatatan yang baik dan tepat, serta terdapat tumpang tindih pencatatan arus kas masuk dan kas keluar pada beberapa kegiatan operasional. Setiap bulannya, bendahara pondok menerima pembayaran santri berupa iuran syahriah yang di dalamnya terdapat komponen pembayaran uang makan, listrik, tabungan, madrasah, dan kas kamar. Setelah itu, bendahara akan mendistribusikan uang syahriah ke buku-buku catatan keuangan sesuai dengan pembagian komponen pembayaran tersebut. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa praktek tersebut tidak konsisten, bendahara belum teratur untuk melakukan pencatatan pendistribusian penerimaan uang syahriah setiap bulannya, serta seringkali menggunakan uang yang tidak sesuai dengan pos pembagian komponen pembayarannya seperti menggunakan komponen uang makan untuk membayar listrik. Sehingga saldo sesungguhnya dari masing-masing komponen pembayaran serta saldo aset neto pondok pesantren sulit diketahui. Kondisi ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak relevan

untuk pengambilan keputusan yang efisien dan bijaksana oleh ketua pengurus dan pengasuh pondok pesantren.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti bermaksud ingin mengetahui sistem pengelolaan informasi keuangan di pondok pesantren Raudlotul Qur'an dan selanjutnya memberikan rekomendasi rancangan sistem informasi akuntansi yang disesuaikan dengan karakteristik pondok pesantren sehingga dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Research Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal dengan pondok pesantren Raudlotul Qur'an sebagai objek penelitian. Jenis pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan mengeksplorasi masalah yang terjadi pada suatu objek penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang selanjutnya diolah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang diungkap (Sugiyono, 2014).

Penelitian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan yaitu dari bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang bertempat di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkangkulon Semarang. Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang dan mengetahui tentang prosedur pengelolaan keuangan pondok pesantren, yaitu pengasuh pondok pesantren, ketua pondok pesantren, pengurus pondok pesantren, dan bendahara pondok pesantren. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan pondok pesantren dan aturan atau prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku di pondok pesantren.

3. Results and Analysis

3.1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an

Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran keilmuan agama untuk mencetak generasi islami yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah berlandaskan Al-Quran dan As sunnah. Perkembangan teknologi yang semakin maju dari masa ke masa, menuntut setiap orang yang hidup di zamannya untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Maka tak hanya ilmu agama secara salafi yang diajarkan, namun juga pengetahuan teknologi agar mampu menyelaraskan keilmuan yang ada. Selain itu, Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an memiliki beberapa usaha yang dikelola oleh santri-santri. Diantaranya ada tambak ikan air tawar, warung pom mini, dan toserba.

Struktur organisasi tertinggi adalah pengasuh, kemudian penasihat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan departemen-departemen. Secara kegiatan operasional, semua komponen di dalam struktur organisasi berkewajiban untuk melaporkan kegiatan yang dilakukannya kepada ketua pengurus pondok pesantren. Namun, secara pencatatan dan pengelolaan keuangan, departemen-departemen tersebut melaporkannya kepada ketua dan wakil pengurus, serta kepada pengasuh pondok pesantren. Di dalam struktur organisasi kepengurusan pondok putra tidak terdapat departemen konsumsi karena untuk kebutuhan konsumsi santri putra dan putri dikelola oleh departemen konsumsi yang ada di kepengurusan pondok putri. Sehingga setiap bulannya, bendahara pondok putra akan menyetorkan sejumlah uang untuk kebutuhan makan santri putra kepada departemen konsumsi pondok putri. Terdapat dua orang bendahara yang bertugas untuk masing-masing pondok pesantren putri dan pondok pesantren putra. Keduanya bertugas dalam proses penerimaan, pengeluaran, pencatatan, serta pengelolaan keuangan. Tidak ada pemisahan tugas antara bagian yang mencatat dan menyimpan kas.

Metode pencatatan yang dilakukan oleh pondok pesantren Raudlotul Qur'an yaitu menggunakan *cash basis*, dimana pencatatan dilakukan ketika ada transaksi kas masuk atau kas keluar (Sulistiani, 2020) sehingga pondok pesantren belum mampu menyusun laporan posisi keuangannya. Aset-aset yang dimiliki pondok pesantren belum pernah dibukukan secara tertib dan pengukuran atas nilai transaksinya hanya menggunakan nilai historis yaitu mencatat sesuai dengan harga yang dibayarkan ketika memperoleh aset tersebut tanpa adanya penyesuaian

dengan nilai wajar saat ini. Bendahara pondok pesantren melakukan pencatatan dengan metode *single entry* yaitu dimana transaksi dicatat hanya satu sisi dari setiap transaksi keuangan (Halim, 2012) sebagai penerimaan saja maupun pengeluaran saja. Di dalam buku catatan terdapat kolom debit yang diasumsikan sebagai penerimaan dan kolom kredit sebagai pengeluaran yang dirinci sesuai transaksinya pada kolom keterangan.

Setiap bulannya pondok pesantren Raudlotul Qur'an memperoleh pendapatan berupa infaq, bagi hasil dari unit usaha yang dimiliki pondok, registrasi santri baru, serta dari uang pembayaran *syahriah* para santri. Pemasukan yang berasal dari infaq, bendahara langsung mencatatnya pada Buku Kas pada saat terjadinya transaksi, namun belum tertib dalam memberikan bukti penerimaan kepada pemberi infaq. Selain itu, Pondok pesantren memiliki unit usaha berupa pom mini, toserba, dan tambak ikan air tawar. Setiap bulannya, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari masing-masing unit usaha akan melaporkan catatan keuangannya kepada bendahara serta pengasuh pondok dan kemudian memberikan bagi hasil dari laba kepada bendahara pondok sebagai penerimaan pondok pesantren. Ketika ada transaksi bagi hasil laba tersebut, bendahara akan mencatatnya pada Buku Kas. Begitupula dengan Registrasi santri baru, pencatatan langsung dilakukan di dalam Buku Kas dan dirincikan sesuai dengan komponen pembayaran yang ada di administrasi registrasi santri baru yaitu pendaftaran, KTK santri, infaq pembangunan, *syahriah*, almari, rapot madrasah, kalender, buku majmu'ah, buku ijin, baju seragam. Setelah membayar registrasi, santri baru akan mendapat bukti pembayaran berupa kwitansi dan KSS. Pencatatan Registrasi santri baru dilakukan langsung di dalam Buku Kas dan dirincikan sesuai dengan komponen pembayaran yang ada di administrasi registrasi santri baru yaitu pendafatara, KTK santri, infaq pembangunan, *syahriah*, almari, rapot madrasah, kalender, buku majmu'ah, buku ijin, baju seragam.

Frekuensi transaksi yang paling sering terjadi adalah penerimaan dari uang *syahriah*. Santri dapat sewaktu-waktu membayarkannya kepada bendahara pondok dengan menyerahkan uang beserta Kartu *Syahriah* Santri (KSS). Sehingga, pada saat transaksi tersebut terjadi, bendahara pondok akan mencatatnya terlebih dahulu ke dalam Buku Rekap *Syahriah*, dan setiap dua kali dalam sebulan akan mencatatnya pada Buku Kas. KSS akan diisi oleh bendahara pondok berupa tanggal pembayaran, rincian komponen pembayaran, jumlah, tanda tangan bendahara, serta stempel lunas. Namun, bendahara tidak memberikan bukti penerimaan lain seperti kwitansi atas pembayaran uang *syahriah* tersebut. Pada akhir bulan, bendahara akan mengalokasikan komponen uang *syahriah* tersebut ke dalam buku khusus makan santri, madrasah diniyah, tabungan, listrik, kas kamar, dan bisyaroh. Selain bendahara pondok, terdapat beberapa departemen yang bertanggungjawab atas pencatatan dan pengelolaan buku khusus tersebut, yaitu departemen konsumsi, departemen pendidikan, departemen kebersihan, dan departemen kesehatan.

Departemen konsumsi bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan buku khusus makan santri tersebut, mulai dari belanja kebutuhan masak, peralatan masak dan makan, hingga pengeluaran biaya untuk honor petugas masak. Bukti atas pengeluaran biaya untuk belanja serta pembelian peralatan tersebut sudah terdokumentasi dengan baik yaitu dengan menyimpan dan mengarsipkan nota-nota pembelian. Sedangkan pengeluaran biaya untuk honor petugas masak belum terdapat bukti yang memadai. Departemen pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya atas pencatatan dan pengelolaan dana di buku khusus madrasah diniyah. Setiap bulannya akan menerima pemasukan dari bendahara pondok pesantren kemudian akan dikelola untuk kebutuhan operasional madrasah dinisyah seperti peralatan belajar mengajar, seragam, dan penghargaan prestasi. Diantara pemasukan ke buku khusus kas kamar, terdapat transfer ke departemen kesehatan dan departemen kebersihan yang mana pencatatan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab masing-masing departemen. Setiap akhir bulan, departemen kebersihan akan menerima pemasukan dari bendahara pondok pesantren dan diperuntukkan untuk membiayai keperluan kebersihan pondok pesantren. Begitupula dengan departemen kesehatan, setiap akhir bulannya akan mendapatkan pemasukan dari bendahara dan diperuntukkan untuk membiayai keperluan pemenuhan fasilitas sarana prasana kesehatan di pondok pesantren seperti pembelian obat-obatan, alat tensi meter, dan termometer. Namun, atas semua transaksi transfer dari Buku Kas yang menjadi tanggungjawab bendahara pondok ke buku khusus yang menjadi tanggung jawab departemen tertentu, belum terdapat bukti yang memadai. Bendahara

pondok pesantren tidak pernah memberikan kwitansi kepada departemen atas transfer dana yang dilakukan dan departemen juga tidak memberikan bukti atas penerimaan dana. Bendahara pondok hanya mencatat ada pengeluaran untuk departemen di Buku Kas, dan departemen hanya mencatat ada pemasukan dari Bendahara pondok. Walaupun begitu, setiap bulan bendahara pondok akan mengecek catatan keuangan dari masing-masing departemen tersebut. Pada akhir bulan, bendahara pondok pesantren akan memberikan laporan kepada ketua dan pengasuh pondok pesantren sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Laporan tersebut menyajikan informasi kas masuk dan kas keluar serta sisa saldo setelah dipergunakan untuk seluruh kegiatan operasional di pondok pesantren. Walaupun jarang terjadi defisit pada laporan keuangan secara global, namun apabila ditelisik lebih dalam, beberapa buku catatan khusus seringkali mengalami defisit. Hal ini terjadi karena kondisi yang mengharuskan adanya pinjam meminjam saldo antar buku khusus. Sedangkan laporan akhir tahun dilakukan pada bulan desember dengan menunjukkan seluruh buku catatan keuangan dan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu akan diadakan rapat untuk tutup buku yang disaksikan oleh seluruh pengurus pondok pesantren dan pengasuh pondok pesantren.

3.2. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an

Teori *decision usefulness* menyatakan bahwa tujuan utama adanya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang mana informasi tersebut harus relevan dan andal. Guna mencapai tujuan tersebut, pondok pesantren perlu memiliki suatu sistem pengelolaan informasi keuangan yang dapat mendukung terciptanya informasi yang relevan dan andal untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Informasi yang relevan dan andal adalah informasi yang dapat tersedia secara tepat waktu dalam periode pengambilan keputusan, terbebas dari kesalahan material, serta dapat mencerminkan secara tepat atas transaksi yang terjadi di dalam pondok pesantren.

Guna mengadopsi pendekatan *decision usefulness*, perlu diketahui terlebih dahulu siapa saja pengguna laporan keuangan dan apa saja masalah atau kesulitan yang dihadapi atas laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pondok pesantren Raudlotul Qur'an. Berdasarkan uraian hasil yang telah penulis deskripsikan, pengguna laporan keuangan pondok pesantren adalah untuk kalangan internal yaitu pengurus dan pengasuh pondok pesantren pada khususnya dan secara umum untuk pihak eksternal seperti pemberi infaq. Sedangkan diantara permasalahan yang terjadi atas pencatatan laporan keuangan yaitu:

1. Terdapat dua bendahara yang memiliki tugas yang sama.
2. Kurang tertibnya administrasi keuangan seperti pemberian kwitansi kepada santri atas pembayaran *syahriah* dan kepada donatur atas pemberian infaq
3. Pencatatan keuangan yang dihasilkan belum konsisten dan tidak lengkap.
4. Tidak memiliki format laporan keuangan yang konsisten.

Guna menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut, maka sistem pengelolaan informasi keuangan pondok pesantren Raudlotul Qur'an perlu memiliki pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta memiliki alur dan format pencatatan keuangan yang konsisten.

3.2.1. Pemisahan Tugas dan Wewenang Bendahara (Pencatat dan Pemegang Kas)

Pemberian tugas dan wewenang yang sama terhadap beberapa orang yang dijadikan sebagai bendahara merupakan titik kelemahan dari struktur organisasi karena menjadikan lemahnya pengendalian. Menurut Mulyadi (2016) terdapat 4 unsur pokok pengendalian internal yaitu (1) struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, (2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan biaya, (3) praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, serta (4) karyawan yang mutungan sesuai dengan tanggungjawabnya. Berdasarkan uraian di atas, seharusnya terdapat pemisahan tugas yang memadai terhadap 2 bendahara pondok pesantren, yaitu ada bagian bendahara administrasi dan bendahara penyimpanan kas. Bendahara bagian administrasi hanya bertugas untuk mencatat yaitu membukukan segala transaksi yang terjadi di pondok secara tertib, sistematis, dan rinci serta membuat laporannya, sedangkan kas tunai maupun kas pada bank disimpan oleh bendahara penyimpanan kas. Sehingga nantinya akan terjadi saling mengecek diantara fungsi-fungsi yang

saling terlibat dan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sebaiknya dilakukan pula terhadap departemen-departemen yang diberikan wewenang untuk mencatat dan mengelola keuangannya sendiri seperti departemen konsumsi, departemen pendidikan, departemen kebersihan, dan departemen kesehatan.

3.2.2. Penyajian Laporan Keuangan

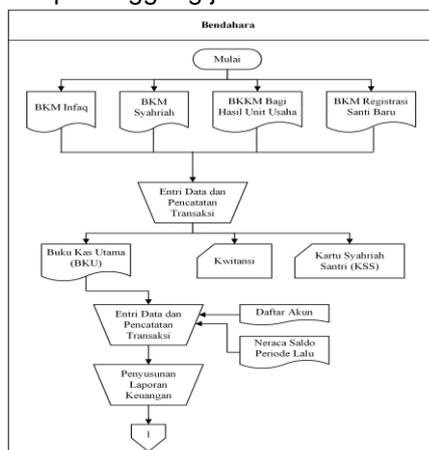
Karakteristik umum penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diantaranya yaitu penyajian yang konsisten. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2013). Oleh karena itu, pondok pesantren perlu memiliki akun-akun atau pos-pos yang dapat merepresentasikan transaksi ekonomi yang terjadi sehingga penyajian laporan keuangan dapat konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengusulkan akun-akun yang dapat merepresentasikan atas kejadian ekonomi yang terjadi di pondok pesantren Raudlotul Qur'an sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun	Jenis
4100	Pendapatan	
4101	Pendapatan Syahriah Santri	Pendapatan
4102	Pendapatan Infaq	Pendapatan
4103	Bagi Hasil Unit Usaha	Pendapatan
4104	Registrasi Santri Baru	Pendapatan
5100	Beban	
5101	Beban Makan Santri	Beban
5102	Beban Iuran Kegiatan Non Rutin	Beban
5103	Beban Madrasah Diniyah	Beban
5104	Beban Operasional Kamar	Beban
5105	Beban Listrik	Beban
5106	Beban Telepon & Internet	Beban
5107	Beban ATK	Beban
5108	Beban Sewa	Beban
5109	Beban Keamanan	Beban
5110	Beban Kebersihan	Beban
5111	Beban Kegiatan Kepesantrenan	Beban
5112	Beban Pembangunan	Beban
5113	Beban Depresiasi	Beban Depresiasi
5114	Beban Kesehatan	Beban
5115	Beban Kebutuhan Minum Kamar	Beban
5116	Beban Bisyaroh	Beban
5117	Beban Administrasi dan Umum lainnya	Beban

Gambar 1. Akun-akun Laporan Keuangan

3.2.2.1 Alur Penerimaan Kas

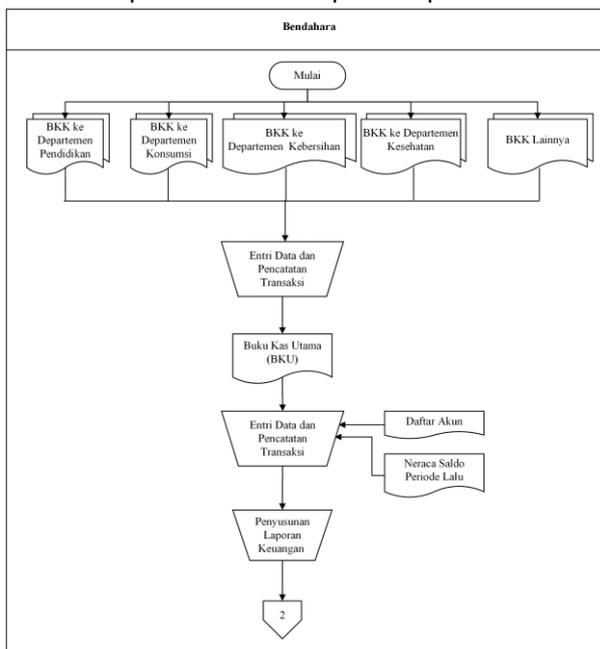
Alur penerimaan kas dimulai dari adanya pemasukan yang berasal dari *syahriah* santri, infaq dari donatur, bagi hasil laba dari unit usaha yang dimiliki pondok pesantren, serta berasal dari registrasi santri baru. Semua penerimaan tersebut dicatat di Buku Kas Utama (BKU) dengan keterangan rinci sesuai komponen pembayarannya seperti *syahriah* santri memiliki komponen pembayaran madrasah diniyah, makan santri, tabungan, listrik, kas kamar, dan bisyaroh. Bendahara wajib memberikan kwitansi pembayaran kepada pemberi dana yaitu santri, donatur, dan penanggung jawab unit usaha



Gambar 2. Alur Penerimaan Kas

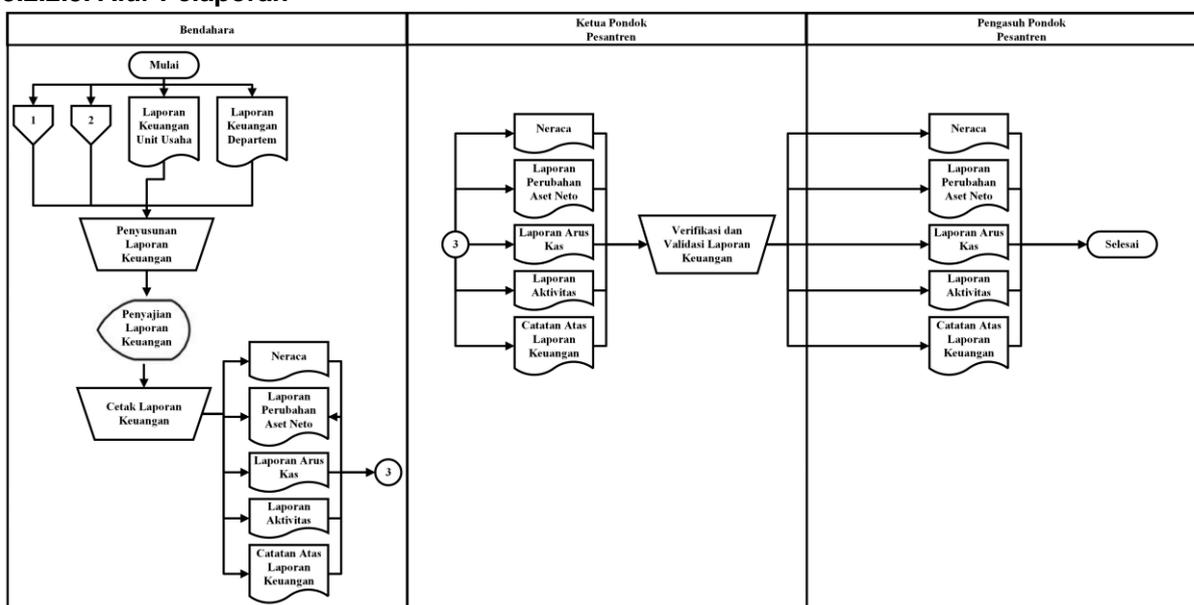
3.2.2.2 Alur Pengeluaran Kas

Alur pengeluaran kas dari bendahara adalah segala pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pondok pesantren Raudlotul Qur'an termasuk pengeluaran berupa transfer kepada departemen pendidikan, departemen konsumsi, departemen kesehatan, dan departemen kebersihan yang mana departemen-departemen tersebut melakukan pencatatan dan pengelolaan secara mandiri. Atas pengeluaran-pengeluaran tersebut hendaknya bendahara langsung mencatatnya pada BKU dengan keterangan rinci atas transaksi pengeluaran kas tersebut. Selain itu, bendahara perlu membuat Bukti Kas Keluar (BKK) yang dicetak sebanyak 2 kali masing-masing untuk arsip bendahara dan lainnya diberikan kepada departemen bersangkutan sebagai dokumen yang sah untuk mencatat adanya transaksi pengeluaran kas pada bendahara pondok pesantren dan transaksi penerimaan kas pada departemen tersebut. Pada akhir periode, hendaknya departemen-departemen melakukan tutup buku pencatatan dan saldo yang tersisa disetorkan kembali kepada bendahara pondok pesantren sebagai penerimaan kas.



Gambar 3. Alur Pengeluaran Kas

3.2.2.3. Alur Pelaporan



Gambar 4. Alur Pelaporan

3.3. Sistem Pengelolaan Informasi Keuangan Pondok Pesantren Sesuai SAK ETAP dan ISAK 35

Bank Indonesia (BI) bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) setelah menerbitkan Buku Pedoman Akuntansi Pesantren dengan acuan utama penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. Pondok pesantren merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik karena tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Hal ini sejalan dengan karakteristik fundamental agar informasi berguna untuk pengambilan keputusan adalah adanya relevansi dan keandalan atas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan. SAK ETAP menyatakan terdapat 10 karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat

Komponen laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, untuk kebutuhan laporan keuangan pondok pesantren yang mana merupakan organisasi yang tidak berorientasi laba atau nonlaba yaitu organisasi yang memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (Dewan Standar Akuntansi Indonesia, 2019). Oleh karena itu, diperlukan tambahan aturan berupa Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang berisi penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 menyatakan bahwa entitas nonlaba dapat membuat deskripsi yang digunakan untuk akun-akun tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan, dapat menyesuaikan deskripsi atas laporan keuangan itu sendiri, dan harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menyajikan laporan keuangannya termasuk mengenai catatan atas laporan keuangan, sifat sumber daya seperti adakah pembatasan (terikat) atau tidak adanya pembatasan (tidak terikat) oleh pemberi sumber daya.

Berdasarkan informasi situasi pencatatan keuangan yang ada di pondok pesantren Raudlotul Qur'an, peneliti mengusulkan bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu SAK ETAP dan ISAK 35 sebagai berikut.

Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an				
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)				
Per Tanggal 31 Des 2023				
Kode	Nama Akun	31 Des 2022	Periode Berjalan	31 Des 2023
ASET				
ASET LANCAR				
1100	Kas			
1101	Kas Tunai	Rp -	Rp -	Rp -
1102	Kas Makan	Rp -	Rp -	Rp -
1103	Kas Tabungan Santri	Rp -	Rp -	Rp -
1104	Kas Madrasah Diniyah	Rp -	Rp -	Rp -
1105	Kas Kamar	Rp -	Rp -	Rp -
1106	Kas Listrik	Rp -	Rp -	Rp -
1107	Kas Telepon & Internet	Rp -	Rp -	Rp -
1108	Kas Bisyaroh	Rp -	Rp -	Rp -
1109	Kas Pembangunan	Rp -	Rp -	Rp -
1200	Bank			
1201	BRI	Rp -	Rp -	Rp -
1202	BNI	Rp -	Rp -	Rp -
1203	BSI	Rp -	Rp -	Rp -
1300	Piutang			
1301	Piutang Santri	Rp -	Rp -	Rp -
1302	Piutang Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
1400	Aset Lancar Lainnya			
1401	Beban Dibayar Di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
1402	Pembelian Dibayar Di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
1403	Perengkapan	Rp -	Rp -	Rp -
	Total Aset Lancar	Rp -	Rp -	Rp -
ASET TETAP				
1500	Aset Tetap			
1501	Inventaris Pondok	Rp -	Rp -	Rp -
1502	Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
1503	Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
1504	Akum. Penyusutan Inventaris Pondok	Rp -	Rp -	Rp -
1505	Akum. Penyusutan Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
1506	Akum. Penyusutan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
	Total Aset Tetap	Rp -	Rp -	Rp -
	TOTAL ASET	Rp -	Rp -	Rp -
LIABILITAS				
2100	Liabilitas Jangka Pendek			
2101	Utang Rekanan Jangka Pendek	Rp -	Rp -	Rp -
2102	Utang Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Total Liabilitas Jangka Pendek	Rp -	Rp -	Rp -
2200	Liabilitas Jangka Panjang			
2201	Utang Bank	Rp -	Rp -	Rp -
2202	Utang Rekanan Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -
	Total Liabilitas Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -
	TOTAL LIABILITAS (KEWAJIBAN)	Rp -	Rp -	Rp -
ASET NETO				
3100	Aset Neto			
3101	Aset Neto Terikat	Rp -	Rp -	Rp -
3102	Aset Neto Tidak Terikat	Rp -	Rp -	Rp -
	TOTAL ASET NETO	Rp -	Rp -	Rp -
	TOTAL LIABILITAS (KEWAJIBAN) DAN ASET NETO	Rp -	Rp -	Rp -

Gambar 5. Format

Neraca

Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an		
Laporan Perubahan Aset Neto		
Periode Laporan Keuangan 01 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		
		31 Des 2023
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo Awal	Rp	-
Surplus (Defisit) Periode Lalu	Rp	-
Surplus (Defisit) Periode Berjalan	Rp	-
Saldo Akhir Aset Neto Tidak Terikat	Rp	-
Aset Neto Terikat		
Saldo Awal	Rp	-
Surplus (Defisit) Periode Lalu	Rp	-
Surplus (Defisit) Periode Berjalan	Rp	-
Saldo Akhir Aset Neto Tidak Terikat	Rp	-

Gambar 6. Usulan Format Laporan Perubahan Aset Neto.

Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an		
Laporan Arus Kas		
Periode Laporan Keuangan 01 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		
Aktivitas Operasional		
Surplus (Defisit)	Rp	-
Beban Depresiasi	Rp	-
Penurunan (Kenaikan) Piutang	Rp	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Pendek	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	Rp	-
Aktivitas Investasi		
Perolehan/Penjualan Aset Tetap	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	-
Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran/Penerimaan Utang Jangka Panjang	Rp	-
Aset Neto Terikat	Rp	-
Aset Neto Tidak Terikat	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	Rp	-
Saldo Kas Awal	Rp	-
Saldo Kas Akhir	Rp	-

Gambar 7. Usulan Format Laporan Arus Kas.

Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an				
Laporan Aktivitas				
Periode Laporan Keuangan 01 Jan 2023 s/d 31 Des 2023				
Kode Akun	Nama Akun	Tidak Terikat	Terikat	Jumlah
Pendapatan				
4101	Pendapatan Syahriah Santri	Rp	- Rp	- Rp
4102	Pendapatan Infaq	Rp	- Rp	- Rp
4103	Bagi Hasil Unit Usaha	Rp	- Rp	- Rp
4104	Registrasi Santri Baru	Rp	- Rp	- Rp
	Total Pendapatan	Rp	- Rp	- Rp
Beban				
5101	Beban Makan Santri	Rp	- Rp	- Rp
5102	Beban Iuran Kegiatan Non Rutin	Rp	- Rp	- Rp
5103	Beban Madrasah Diniyah	Rp	- Rp	- Rp
5104	Beban Operasional Kamar	Rp	- Rp	- Rp
5105	Beban Listrik	Rp	- Rp	- Rp
5106	Beban Telepon & Internet	Rp	- Rp	- Rp
5107	Beban ATK	Rp	- Rp	- Rp
5108	Beban Sewa	Rp	- Rp	- Rp
5109	Beban Keamanan	Rp	- Rp	- Rp
5110	Beban Kebersihan	Rp	- Rp	- Rp
5111	Beban Kegiatan Kepesantrenan	Rp	- Rp	- Rp
5112	Beban Pembangunan	Rp	- Rp	- Rp
5113	Beban Depresiasi	Rp	- Rp	- Rp
5114	Beban Kesehatan	Rp	- Rp	- Rp
5115	Beban Kebutuhan Minum Kamar	Rp	- Rp	- Rp
5116	Beban Bisyaroh	Rp	- Rp	- Rp
5117	Beban Administrasi dan Umum lainnya	Rp	- Rp	- Rp
	Total Beban	Rp	- Rp	- Rp
	Surplus (Defisit)	Rp	- Rp	- Rp

Gambar 8. Usulan Format Laporan Aktivitas.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) harus disusun dan disajikan secara sistematis sesuai dengan urutan komponen laporan keuangan yang disajikan oleh pondok pesantren. Umumnya urutan penyajian komponen laporan keuangan dimulai dari neraca, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun informasi yang dapat disajikan di CaLK bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi instansi yang mana di dalamnya memberikan penjelasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas komponen laporan keuangan yang telah disajikan, seperti informasi mengenai pendapatan apa saja yang bersifat terikat dan pendapatan yang bersifat non terikat.

4. Conclusion

Pondok pesantren Raudlotul Qur'an melakukan pencatatan dengan metode *single entry* yang mana hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Setiap akhir bulan, bendahara melaporkan buku catatan yang berisi total penerimaan, pengeluaran, dan sisa saldo kepada ketua dan pengasuh pondok pesantren. Selain itu, terdapat 2 bendahara yang memiliki tugas dan wewenang yang tumpang tindih dan tidak ada pembagian tugas yang jelas diantara keduanya. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan tugas dan wewenang untuk setiap bendahara, bagan alir penerimaan dan pengeluaran kas, bukti-bukti yang perlu ada untuk setiap transaksi, usulan nama akun, dan format laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi pondok pesantren serta SAK ETAP dan ISAK 35. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting untuk penyusunan sistem informasi akuntansi bagi pondok pesantren di Indonesia serta pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis digital.

References

- [1] Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2012). *Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, Proses, dan Penerapan*. Andi Publisher.
- [2] Ansyé Paulus. (2016). FUNGSI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ATAS PENGENDALIAN INTERNAL PENDAPATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT SILOAM MANADO). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 922–931.
- [3] Azhar Susanto. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya.
- [4] Bank Indonesia, I. A. I. (2018). *Pedoman Akuntansi Pesantren*. Bank Indonesia.
- [5] Dewan Standar Akuntansi Indonesia. (2019). *ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- [6] Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2013). *PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- [7] G.J Staubus. (1999). *The Decision-Usefulness Theory of Accounting: A Limited History*. Garland Publishing.
- [8] Halim, Abdul. , et al. (2012). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Salemba Empat.
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*.
- [10] Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/interpretasi-sak-30-isak-35-penyajian-laporan-keuangan-entitas-berorientasi-nonlaba>
- [11] Jabbar, A. A. (2017). Decision Usefulness Approach to Financial Reporting: A Case for Employees. *International Journal of Advanced Engineering, Management and Science*, 3(5), 481–487. <https://doi.org/10.24001/ijaems.3.5.12>
- [12] Kieso, W. and W. (2005). *Intermediate Accounting, 11th edition*. Willey: USA.
- [13] Marshal B. Romney & Paul John Steinbart. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi* (13th ed.). Salemba Empat.
- [14] Matthew B. Miles, A. M. H. J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- [15] Mukti, A., Budianti, Y., & Hamdani, H. (2020). The Financial Aspects of Islamic Education (An Idea to Improve the Quality of Islamic Education in Islamic Boarding Schools). *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 2(12). <https://doi.org/10.29103/ijevs.v2i12.3042>
- [16] Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- [17] Nguyen, H. T. T., Nguyen, H. T. T., & Nguyen, C. Van. (2023). Analysis of factors affecting the adoption of IFRS in an emerging economy. *Heliyon*, 9(6), e17331. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17331>
- [18] Pandowo, H., & Sari, C. (2022). Blue Print Website Application as a medium for transparency of Islamic Boarding School Activities at Subulul Huda Islamic Boarding

- School. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 7(2).
<https://doi.org/10.32486/aksi.v7i2.418>
- [19] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, (2020).
- [20] Puspitaningtyas, Z. (2010). Decision Usefulness Approach Of Accounting Information: Bagaimana Informasi Akuntansi Menjadi Useful? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 92. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n1.p92-108>
- [21] Qizam, I. (2021). Developing a Framework of Improved Decision Usefulness in Financial Information. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1229. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p12>
- [22] Renkas, J., Goncharenko, O., & Lukianets, O. (2015). Quality of financial reporting: approaches to measuring. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509>
- [23] Rukanda, N., Hasan, B., Jawa Barat Indonesia, K., Siliwangi, I., & Jawa Barat Indonesia, B. (2020). ISLAMIC BOARDING SCHOOL MANAGEMENT IN IMPROVING STUDENT QUALITY. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 9(2), p.
- [24] Shuhidan, S. M., Mastuki, N., & Nori, W. M. N. W. M. (2015). Accounting Information System and Decision Useful Information Fit Towards Cost Conscious Strategy in Malaysian Higher Education Institutions. *Procedia Economics and Finance*, 31, 885–895. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01186-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01186-7)
- [25] Sjafrudin, A. (2018). *Mengembangkan Kestrategisan Pondok Pesantren*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. <https://pendis.kemenag.go.id/read/mengembangkan-kestrategisan-pondok-pesantren>
- [26] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta.
- [27] Suharni, S., & Kartika Sari, S. R. (2019). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Di Kota Madiun. *JURNAL EKOMAKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 8(2), 53–63. <https://doi.org/10.33319/jeko.v8i2.43>
- [28] Sulistiani, D. (2019). Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah. *Akuntabilitas*, 12(2), 237–248. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.9662>
- [29] Sulistiani, D. (2020a). Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- [30] Sulistiani, D. (2020b). Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- [31] Supriyati, S., & Bahri, R. S. (2020). Model Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Laporan Keuangan Pondok Pesantren Berbasis SAK ETAP. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 4(2), 151–165. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v4i02.2749>
- [32] Wibisono, Y. P., & Setyohadi, D. B. (2017). Accounting information system for nonprofit organization based on PSAK 45 standards. *2017 2nd International Conferences on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE)*, 136–140. <https://doi.org/10.1109/ICITISEE.2017.8285482>